

DINAMIKA ELITE KESULTANAN TERNATE DALAM PERUBAHAN REZIM: KESULTANAN TERNATE PASCA KEMERDEKAAN RI

Rustam Hasim
Universitas Khairun
hasyimrustam7@g.mail.com

Abstract

This study provides an insight into the political landscape in the Ternate region during the Soekarno era. Following the proclamation of independence, the palaces in Indonesia experienced a loss of legitimacy. This period was characterized by intense ideological and political upheaval, with the traditional power of the nobility being confronted by anti-swaraja factions. The foundation that elevated the nobility to a prestigious status, previously altered during the Dutch colonial era, was once again undermined by the establishment of state nationalism ideology, which emphasised devotion to the state as its primary principle. The authority and status of the autonomous elite in the Ternate Sultanate were undermined by the advent of a centralized state and the ideology that accompanied it. This ideology stressed allegiance to the state and introduced a modern political structure that separated public offices from traditional power. Consequently, the role of the sultan does not inherently entail that of a governor or regent. In contrast, they are selected through a competitive process within a political party. Furthermore, positions in the bureaucracy are no longer determined solely by ancestry, but rather by specific qualifications and abilities. Furthermore, in the contemporary political structure, there is a clear distinction between public positions and cultural authority. This division is based on hereditary status in the palace, while public institutions are established through competitive processes involving the governor, regent, or sultan, and the aristocracy.

Keywords: Elite, Politics, Ternate Sultanate.

PENDAHULUAN

Catatan sejarah menunjukkan, keterlibatan elite politik Kesultanan Ternate dalam satu negara bangsa dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia, yang ditandai dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946. Sultan Iskandar Muhammad Jabir Syah, Sultan Ternate ke-47, terinspirasi secara politik dengan berdirinya Negara Indonesia Timur. Ia menjadi anggota senat NIT mewakili Maluku Utara dan aktif mengikuti konferensi Malino dan Denpasar sebagai desainer dan perwakilan Maluku Utara. Iskandar Jabir Syah, seorang pemimpin federalis terkemuka, memainkan peran penting dalam advokasi pembentukan Negara Indonesia Timur. Ia aktif berpartisipasi dalam konferensi Malino dan

pembangunan negara selanjutnya pada tahun 1949. Sebagai pengakuan atas kontribusinya, Iskandar Jabir Syah diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur pada kabinet J.E., menjabat mulai Desember 27, 1947, hingga 14 Maret 1950.

Keadaan politik menunjukkan bahwa pada masa kebangkitan pemerintahan Sukarno, eselon atas Kesultanan Ternate menghadapi keterbatasan. Sultan Ternate ke-47, Iskandar Djabir Syah (1929-1975), mengambil keputusan politik untuk mendukung berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT) yang dipimpin oleh Herbertus J. van Mook pada tahun 1946. Akibatnya, ia terpaksa melakukan hal tersebut. Ia pindah ke Jakarta pada tahun 1950 karena tuduhan sebagai pendukung federalisme. Kesenjangan pandangan mengenai struktur dan kerangka pemerintahan Indonesia pasca

kemerdekaan menyebabkan elit kesultanan menahan dukungannya terhadap partai politik Sukarno pada pemilu 1955. Keputusan politik ini terbukti merugikan posisi mereka, karena mereka tidak hanya harus menghadapi musuh politik lokal tetapi juga kekuatan nasional.

Kehadiran kelas istimewa yang bertahan lama. Perilaku konfrontatif para elite di kesultanan merespon Presiden Soekarno dengan menerapkan beberapa kebijakan untuk membatasi pengaruh politik mereka. Salah satu kebijakan tersebut adalah pembubaran dewan raja yang beranggotakan Sultan Ternate, Tidore, Bacan, dan Noord Molukken Raat. Dewan ini berfungsi sebagai badan eksekutif dan legislatif yang mengadvokasi federalisme pada tahun 1950. Oleh karena itu, kelas penguasa di kesultanan kehilangan sarana hukum resmi mereka untuk melakukan kontrol atas pemerintahan lokal. Selanjutnya, kewenangan yang mereka pegang terhadap birokrasi digantikan oleh bupati yang dipilih oleh DPRD. Selanjutnya Keresidenan Ternate dihapuskan dan digantikan dengan pemerintahan daerah tingkat II di Maluku Utara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958. Akibatnya, kedudukan penguasa tingkat II (Bupati) tidak lagi memerlukan suksesi turun-temurun oleh sultan. dan keluarganya, namun ditentukan melalui pemilu yang mengikuti struktur politik modern. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 diberlakukan untuk mengatasi keterbatasan kepemilikan tanah dan potensi pengalihan kepemilikan pemerintahan sendiri kepada negara.

Di bawah pemerintahan Sukarno, kelas atas Kesultanan menghadapi masa kekacauan politik. Penentangan mereka terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI) dan Partai Penguasa (PNI) bersifat agresif sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa Presiden Soekarno tidak

menghilangkan kehadiran politik mereka di kancah politik lokal di Ternate. Apakah kebijakan-kebijakan di atas berdampak pada kehadiran politik mereka di Ternate, atau justru sebaliknya? Memang benar, meskipun ada pembatasan terhadap keberadaan politik mereka. Namun demikian, dari sudut pandang budaya, hal ini tidak berkontribusi terhadap berkurangnya pengaruh kelas penguasa kesultanan. Keutamaan inti yang tertanam dalam masyarakat Ternate adalah komitmen teguh untuk menghormati dan menaati perkataan dan perintah sultannya, yang terangkum dalam semboyan “jou kasa ngom kage” (di mana ada sultan, di situlah kita berada).

Bubarnya Negara Indonesia Timur pada tanggal 17 Agustus 1950 menimbulkan keheranan di banyak kalangan tentang cepatnya sistem federasi terhapus dari Indonesia. Kurang lebih enam bulan sesudah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat bentuk Negara sudah berubah menjadi suatu Negara kesatuan. Menurut Anak Agung Gde Agung, perubahan bentuk kenegaraan tersebut di kalangan Pemerintah Belanda meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Pemerintah Hindia Belanda menuduh pihak Indonesia tidak jujur dalam pelaksanaan Konferensi Meja Bundar dan menyatakan kekecewaannya’

Bubarnya Negara Indonesia Serikat pada 17 Agustus 1950, bagi tokoh-tokoh federalis merupakan periode “kebencian”. Banyak para tokoh federalis yang ditangkap dan dijadikan tahanan politik karena merupakan kaki tangan Belanda. Hal ini dialami oleh Sultan Ternate Iskandar Djabir Sjah di asingkan ke Jakarta dan ditempatkan sebagai salah satu pegawai Departemen Dalam Negeri, karena dituduh sebagai salah satu tokoh federalis.

Berpijak dari fakta tersebut, alur kajian akan dimulai dengan menelusuri terlebih dahulu bagaimana peta politik lokal pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Era ini penuh dengan pergolakan ideologis dan politis, kaum bangsawan (kekuasaan tradisional) mendapat tantangan dari kelompok-kelompok anti swapraja. Bagian selanjutnya akan memaparkan beberapa peristiwa politik seperti; keterlibatan Sultan Iskandar Djabir Syah dari konperensi Malino hingga terpilih menjadi Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur. Kemudian dilanjutkan uraian mengenai Pemuda Ternate dan penolakan pembentukan NIT, penolakan Sultan Iskandar Djabir Syah atas pembentukan Republik Maluku Selatan, Pemilu 1955 di Ternate: Elite Kesultanan vs non Kesultanan. Bagian terakhir bab ini mengetengahkan bagaimana kondisi politik dan budaya Kesultanan Ternate pasca Sultan Iskandar Djabir Syah. Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan menggambarkan secara terperinci peristiwa-peristiwa politik tersebut.

A. Peta Kekuatan Politik Lokal Pasca Kemerdekaan

Realitas menunjukkan selama pendudukan Jepang di Ternate 1942-1945, Sultan Ternate ke-47 Iskandar Djabir Sjah dan keluarganya diungsikan ke Brisbane Australia atas perintah H.J. van Mook. Pada 27 September 1945 Sultan Iskandar Djabir Syah kembali ke Ternate, dan langsung dilantik sebagai Residen Maluku Utara dengan pangkat Letnan Kolonel KNIL (Kolonel *Tituler der Koninghen Orange van Nasau*). Surat pengangkatannya sebagai Residen tertanggal 16-9-1945, yang isinya “bahwa sehubungan dengan pembicaraan kita beberapa lalu, nampak memberikan jawaban bagi rencana mengangkat Sultan Ternate sebagai perwira KNIL. Mengingat

dia berada di bawah pimpinan Paku Alam dan Mangkunegara dan biasanya berpangkat Kolonel, dia harus diangkat menjadi Letkol”.

Kehadirannya sebagai Residen Maluku Utara, mendapat reaksi dari tokoh-tokoh dan pejuang pro-republik. Gerakan anti Pemerintah Belanda dimotori para pemuda pro-republik yang sebagian besar anggotanya bekas pejuang-pejuang kemerdekaan yang tidak puas dengan sikap yang diambil oleh Sultan Iskandar Djabir sjah pada saat kedatangan dari tempat pengungsian ke Ternate. Perlawanan mereka dilakukan dalam bentuk perampokan, penculikan dan sabbtase kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 12 September 1946 tentara KNIL melakukan aksi pembersihan dengan menangkap dan menembak mati kelompok yang dipandang ekstrimis (kaum pendukung negara kesatuan). Mereka itu adalah Muhammad Abd. Rahman Tibi, Sabtu Mataoga, Ahmad Yunus, Katidja, Hasan Esa, Djafar, said Alting, Abdul Wahab Alting, dan mohiddin. Aksi pembersihan itu dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan kepada tokoh pro-republik, sekaligus membuka jalan agar kehadiran Sultan Iskandar Djabir Syah yang diboncengi NICA di Ternate, situasi aman dan tidak menimbulkan gejolak. Mereka menilai Sultan Iskandar Djabir Syah adalah boneka Belanda, karena sejak awal proses penetapannya sebagai sultan sudah diintervensi dan mendapat restu dari Pemerintah Hindia Belanda. Mereka menilai pengangkatannya sebagai Residen sebagai strategi Pemerintah Hindia Belanda agar tetap kembali menguasai daerah koloninya.

Sultan Iskandar Djabir Sjah yang setia kepada Pemerintahan Hindia Belanda mulai melakukan kampanye politik menentang kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda di Ternate dan pembentukan pemerintahan merdeka. Keadaan ini menyebabkan munculnya dua faksi berbeda dengan

ideologi politik yang berbeda: kelompok wiraswasta, yang juga dikenal sebagai bangsawan, dan kelompok pro-republik. Bantuan Belanda yang diberikan kepada sultan menimbulkan pertentangan dari pihak-pihak yang pro-republik.

Pada tanggal 12 November 1945, diadakan pertemuan oleh tokoh-tokoh pro-republik antara lain Arnold Mononutu, Chasan Boesoirie, Abjan Soleman, Abubakar Bachmid, M.A. Hanafi, M. Zen Assagaf, Umar Assagaf, Abd. Rahman Zougira, Muhammad Abd. Rahman, dan Habib Ali Syeh Abubakar. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membahas keadaan di Maluku Utara pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan berbagai keputusan, salah satunya adalah pelarangan kehadiran Belanda di Ternate. Selain itu, sangat penting untuk meminta penghapusan wilayah pemerintahan mandiri Ternate, karena tidak sejalan dengan kemajuan saat ini. Selanjutnya mensosialisasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) melalui media sosial. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat Maluku Utara terhadap berita kemerdekaan Indonesia.

Guna menumpas organisasi pro-republik, Sultan Iskandar Djabir Sjah selaku Residen Maluku Utara memanggil Arnold Mononutu dan Chasan Boesoirie ke istana Kesultanan Ternate pada 11 Desember 1945. Sultan menyampaikan undangan kepada keduanya. perseorangan yang mendukung bentuk pemerintahan republik untuk mendirikan partai politik yang menganut gaya *rijksverband*, guna memudahkan kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Meski demikian, usulan yang diajukan Sultan Iskandar Djabir Sjah ditolak. Usai pertemuan tersebut, Iskandar Djabir Syah mendirikan partai bernama Pasma (Partai Sejarah Maluku Utara) yang fokus

pada *rijksverband*. Partai tersebut dipimpin oleh M. Nasir yang merupakan saudara laki-laki Sultan Iskandar Djabir Sjah. Anggotanya antara lain bangsawan seperti Hasan Ayanhar dan Dano Syafei. Pasma adalah organisasi politik pribumi perdana yang didirikan oleh kelas penguasa Kesultanan Ternate pada tahap awal kemerdekaan.

Selanjutnya, suasana politik di Ternate diwarnai 'panas'. Pada bulan Desember 1945, sebagai tanggapan terhadap hal ini, pemuda pro-republik membentuk kelompok pesaing yang dikenal sebagai Persatuan Indonesia (PI). Ketuanya, M.A. Kamaruddin, didampingi pengurus lainnya, seperti Arnold Mononutu, Chasan Boesoirie, Abubakar Bachmid, M.A. Hanafi, M. Zen Assagaf, dan Abjan Soleman. Partisipasi individu-individu ini dalam organisasi politik bukanlah suatu hal yang baru. Sebelum mencapai kemerdekaan, mereka menjabat sebagai pengurus di banyak organisasi sosial, termasuk Persatuan Politik Indonesia (GAPI), PARINDRA (Partai Indonesia Raya), dan GERINDO (Persatuan Rakyat Indonesia). Selain itu, mereka mendirikan tabloid mingguan bernama "Bulan Kebangkitan Timur" di bawah pimpinan Umar Assagaf dan Abubakar Bachmid. Persatuan Indonesia adalah partai politik lokal pertama pro-Republik yang lahir dikawasan Timur Indonesia, dengan tujuan memberi dukungan kepada Negara Republik Indonesia (RI). Organisasi ini dipakai sebagai alat untuk mengkritik kehadiran kolonial Belanda yang sudah lama berkuasa di Maluku Utara dan daerah-daerah lain di Timur Indonesia. Dalam perkembangannya PI mengalami perkembangan yang pesat, hingga di akhir tahun 1947 PI telah mempunyai cabang di luar Kota Ternate, seperti; Tobelo, Galela, Tidore, Bacan, Makian, Sanana, Weda, dan Jailolo, dengan jumlah anggota kurang lebih 10.000. orang.

Untuk mendistribusikan informasi dan mempromosikan tujuan mereka, mereka mendirikan surat kabar mingguan bernama "Menara Merdeka" di bawah kepemimpinan Umar Assagaf, dengan Arnold Mononutu sebagai editornya. Dengan menggunakan Menara Merdeka, mereka menyebarkan Proklamasi kepada masyarakat, mendesak mereka untuk melawan dan menghadapi penjajah yang berusaha mendapatkan kembali kendali di Maluku. Surat kabar ini tersebar tidak hanya di Maluku Utara, namun juga di Minahasa (Sulawesi Utara) dan Maluku Selatan. Kaum muda secara konsisten mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta dan selanjutnya mengkomunikasikannya kepada masyarakat di Maluku Utara melalui PI. Surat kabar Menara Merdeka secara konsisten memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali semangat perlawanan dan menumbuhkan sentimen anti-Belanda di semua terbitannya.

Perjuangan yang sama pun dilakukan pemuda-pemuda pro-republik di Ambon. Pada 15 Mei 1946 mereka mendirikan Partai Politik Maluku (PARPIM) dengan beranggotakan J. Latuhaharhary, M.Putuhena, Mohammad Padang, dan M.Ruhupatty. Tujuannya ialah mempertahankan Negara Kesatuan RI dan Undang-Undang dasar 45, serta mempertahankan daerah Maluku dalam wilayah RI. Pada tanggal 8 Oktober 1946 ditempat kediaman Gubernur Maluku perserikatan pemuda Ambon mengeluarkan Maklumat:

1. Sebagai orang Ambon, kami menganggap Indonesia sebagai tanah air kami.
2. Kita bekerjasama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk menjaga dan melindungi kedaulatan NKRI.
3. Kami mencari bantuan untuk mencegah saudara-saudara kami dicap sebagai orang Belanda. Kami menghimbau agar saudara-saudara kita tidak dimanfaatkan oleh Belanda, termasuk mantan personel militer Belanda dan anggota tentara Belanda saat ini, demi menjamin tercapainya kemerdekaan Indonesia tanpa hambatan.

Sejarah menunjukan tokoh-tokoh asal Maluku memainkan peran penting pada masa pergerakan, pendudukan Jepang hingga kemerdekaan. Pada masa pergerakan, perjuangan melalui organisasi-organisasi sosial telah berkembang di Ambon seperti; Ambon Raad, Moloeksch Politiek Verbond, Sarekat Ambon dan Ambon Voeruit sebagai dampak dari gerakan kebangkitan nasional, yang muncul pada awal abad ke-20 di Pulau Jawa. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk membina persatuan dan kesatuan menuju gerakan kesadaran nasional. Disamping itu, fungsi organisasi tersebut sebagai sarana pendidikan untuk merubah adat kebiasaan yang telah usang yang mengekang perkembangan masyarakat Maluku dan juga memberi kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Untuk memperjuangkan cita-cita organisasi tersebut, mereka kemudian menerbitkan surat kabar sebagai wadah perjuangannya.

Tabel 1
Perkembangan Media Massa di Maluku 1923-1952

No	Nama Surat Kabar	Pendiri	Tahun Terbit
1	Ambon Vooruit	C.F. de Fretes	1923
2	Minggu Sentosa	Siechan Becmid	1937
3	Sinar Maluku	D. Ajawaila	1930
4	Berita Maluku	P. Tutuarima	1934

5	Masohi Ambon	John Tupamahu	1933
6	Ambon Baru	C.Watimena	1938
7	Utusan Maluku	E.U. Pupella	1934-1935
8	Utusan Kita	Ferderik Kansil	1937-1945
9	Sinar	E.U. Pupella	1946-1952
10	Pendidikan	OT.Pattimaipau	1936-1940
11	Pendidikan Rakyat	E.U. Pupella	1946-1952
12	Siwa Lima	Z. Pesuarissa	1948-1950
13	Suara Rakyat Maluku	C.A. Wairita	1946-1950
14	Menara Merdeka	Arnold Mononutu	1945-1951

Sumber : Di olah dari berbagai sumber

Sejalan dengan situasi politik yang kian meningkat secara nasional, surat kabar tersebut diatas pada masa pergerakan hingga pasca kemerdekaan memaingkan peranan penting dalam menyebarkan informasi, sekaligus meningkatkan semangat nasionalisme rakyat Maluku. Walaupun keberadaan surat-surat kabar tersebut tergolong kecil, akan tetapi sebagai sumber informasi, media-media tersebut cukup berhasil membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Maluku di saat itu.

Pada tanggal 9 Januari 1946, partai Persatuan Indonesia mengadakan kongres ke-2 di Ternate. Kongres tersebut akhirnya memilih Chasan Boesoirie sebagai ketua dan Arnold Manonutu sebagai sekertaris. Terpilihnya kedua tokoh pro-Republik tersebut, PI tampil sebagai organisasi yang sangat tegas menentang seluruh kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Maluku Utara. Dalam laporannya Residen Maluku Utara pada tanggal 15 April 1946, Iskandar Djabir Syah, menyebutkan bahwa PI telah mendongkrak kesadaran politik rakyat Maluku Utara, sehingga menimbulkan kekhawatiran pihak Pemerintah Hindia Belanda di Ternate. Pada tanggal 12 Juli Residen Iskandar Djabir Syah memanggil Chasan Bosorie sebagai ketua PI, memintaanya bahwa dalam perjuangannya tidak boleh menimbulkan kekacuan. Dalam

hal ini Iskandar Djabir Syah dan berkata kepada Chasan Boshorie “*Dokter ik kan niet op tegen de speldeprikken van U. Ik treed af een word van U is volduerde om Noord Moluccan in opstand te brengen.*

Kongres Partai Persatuan Indonesia ke-2 berlangsung di Ternate pada tanggal 9 Januari 1946. Chasan Boesoirie akhirnya terpilih sebagai ketua, sedangkan Arnold Manonutu terpilih sebagai sekretaris oleh kongres tersebut. Dengan terpilihnya dua tokoh pendukung Partai Republik ini, PI menunjukkan sikap tegas terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Maluku Utara. Laporan Iskandar Djabir Syah dari Residen Maluku Utara tanggal 15 April 1946 menunjukkan bahwa PI telah meningkatkan kesadaran politik penduduk Maluku Utara sehingga menimbulkan kekhawatiran di pihak Pemerintah Hindia Belanda di Ternate. Pada tanggal 12 Juli, Residen Iskandar Djabir Syah menunjuk Chasan Bosorie sebagai Ketua PI dan menginstruksikannya untuk memastikan kejelasan upaya mereka. Dalam kesempatan itu, Iskandar Djabir Syah mengungkapkan kepada Chasan Boshorie, “*Dokter ik kan niet op tegen de speldeprikken van U. Ik treed af een word van U is volduerde om Noord Moluccan in opstand te brengen.*

Hubungan yang tidak harmonis antara kedua kelompok tersebut,

menyebabkan beberapa tokoh pro republik seperti Chasan Boshorie dan Arnold Manonutu di berlakukan oleh secara tidak adil oleh tentara KNIL. sebagaimana dikisahkan oleh Chasan Boesoirie “Di Morotai, saya dinterogasi oleh seorang kapten intel Belanda. Ditanyakan alasan mengapa tidak mematuhi perintah D.J. van Mook untuk mengungsi dari Ternate ke Morotai. Saya menyatakan tuan adalah seorang militer, saya seorang dokter, tuan tidak akan mengerti, disatu pihak tuan harus membunuh banyak musuh sedangkan saya menyelematkan jiwa. Jelas kita bertolak belakang”.

Sepanjang sejarahnya, pemerintah Hindia Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal H.J. van Mook sengaja melakukan upaya untuk memulihkan kekuasaan atas wilayah jajahannya di Indonesia dengan membentuk suatu kesatuan yang berdaulat. Untuk melaksanakan idenya, van Mook seorang diri yang mengatur Konferensi Malino di Makasar pada tahun 1946. Tujuannya adalah untuk membentuk negara-negara yang dapat ia gunakan sebagai alat untuk menyaingi republik, dengan maksud untuk mengutamakan kawasan Indonesia Timur sebagai wilayah kekuasaannya. fokus utama. Konferensi tersebut dihadiri oleh delegasi dari Maluku Utara, antara lain Chasan Boesorie dari Persatuan Indonesia, Salim Fabanyo dari Partai Sedjarah Maluku Utara, dan Residen Maluku Utara Sultan Iskandar Dabir Sjah.

B. Partai Republik dan Federalis: Perjuangan Parlemen

Konferensi Denpasar yang berakhir pada tanggal 24 Desember 1946 membentuk Negara Indonesia Timur (NIT). Para peserta konferensi diangkat sebagai anggota sementara parlemen, sambil menunggu pemilihan umum untuk membentuk parlemen permanen. Tadjuddin Noor diangkat sebagai Ketua Parlemen. Perdana

Menteri saat ini adalah Nadjamuddin Daeng Malewa, sedangkan Tjokorda Gde Raka Sukawati menjabat sebagai Presiden di NIT. Berdirinya NIT menandai dimulainya perkembangan Negara Indonesia Serikat (RIS) yang tetap berada di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda, dan hal ini penting bagi van Mook.

Pembentukan NIT mendapat sambutan negatif dari faksi-faksi pro-Republik Indonesia. Konferensi Malino dan Denpasar selama ini dianggap sebagai upaya Belanda untuk menggalang dukungan delegasi daerah di luar Pulau Jawa, dengan tujuan memecah belah bangsa Indonesia. Konferensi Denpasar secara luas dianggap sebagai acara curang karena buruknya organisasi dan pemilihan perwakilan regional yang dipertanyakan. Namun demikian, sejumlah tokoh pro-Republik mendukung pembentukan NIT karena pernyataan eksplisit dalam Perjanjian Linggajati yang mengakui kewenangan de facto Pemerintah Republik atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Pasal 1 perjanjian tersebut menyatakan bahwa wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali Tentara Persatuan atau Tentara Belanda akan secara bertahap dimasukkan ke dalam republik melalui upaya kolaboratif antara kedua belah pihak.

Berdirinya NIT di Ternate mendapat tanggapan dari tokoh-tokoh Persatuan Indonesia, antara lain Arnold Mononutu, Chasan Bosorie, M.S. Jahir, Abjan Soeleman, dan Abubakar Bahmid. Melalui surat kabar Menara Merdeka, mereka mengkritik pembentukan NIT dengan mengatakan “bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Serikat hanya merupakan proses perjuangan menuju Negara Republik Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi 1945. Persatuan Indonesia hanya berdiri di belakang RI

dengan Presidennya Sukarno Hatta dan Perdana Meterinya Sutan Syahrir”.

Reaksi yang sama juga terjadi di Ambon, melalui Partai Indonesia Merdeka (PIM), para pemuda yang pro-Republik dengan tegas menolak pembentukan NIT. Mereka mengatakan “pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai suatu konspirasi politik Belanda oleh karena itu rakyat Maluku hanya bergabung dengan republik Indonesia berdasarkan pasal 3 Perjanjian Linggarjati yang dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan adanya Negara Indonesia Timur”.

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur sebagai negara boneka awal dengan tujuan mendirikan Negara Indonesia Serikat (RIS). Sebagai negara bagian yang baru lahir, senat kini terdiri dari anggota sementara yang dipilih dari delegasi daerah. Pengaturan ini akan berlanjut hingga diadakan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil mereka secara permanen. Negara boneka ini, yang dikenal sebagai NIT, telah memasukkan mantan pejabat Belanda ke dalam struktur pemerintahannya, dan juga merangkul semua faksi politik yang muncul.

Doktrin ini memberikan insentif kepada gerakan republik (unilateral) untuk terus terlibat dalam pertempuran terbuka. Munculnya partai politik pada periode tersebut difasilitasi oleh penerapan dan penerapan gaya pemerintahan demokrasi parlementer oleh NIT, yang membuka jalan bagi berkembangnya gerakan politik. Partai politik dapat bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen nasional, yang dikenal sebagai NIT, serta masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di setiap

daerah otonom. Untuk mencapai hal ini, partai politik dibentuk sebagai alat untuk terlibat dalam konflik. Arnold Mononutu, seorang tokoh Partai Republik dan sekretaris Persatuan Indonesia, terpilih sebagai wakil anggota parlemen dari Maluku Utara, bersama Sultan Iskandar Djabir Sjah, yang mendukung federalisme.

Parlemen NIT terdiri dari tiga faksi berbeda dengan ideologi berbeda. Fraksi pertama adalah Fraksi Demokrat yang mendukung pemerintahan. Faksi ini menganjurkan pembentukan negara federal dan berupaya memperkuat hubungannya dengan Belanda. Perjuangan mereka berpusat pada tindakan politik yang dilakukan oleh Kabinet Nadjamoeddin yang pro-Belanda. Fraksi Demokrat mendapat dukungan dari banyak partai politik, antara lain PASMO dari Ternate, Partai Demokrat, Singa Minahasa dari Manado, Sembilan Serangkai dari Ambon, Lima Serangkai dari Timor, dan Koalisi Sembilan Serangkai. Nama grup ini adalah grup van Mook. Dalam tahap perkembangannya, NIT menolak bergabung dengan RI dan malah membentuk faksi yang memisahkan diri bernama Republik Maluku Selatan. (mengacu pada RMS, yang akan dijelaskan nanti)

Fraksi kedua, yang disebut faksi progresif, berperan sebagai faksi lawan. A. Mononutu, perwakilan PI dari Maluku Utara, mengetuai Fraksi Progresif. Fraksi ini berdedikasi untuk mendorong kesejahteraan di Indonesia Timur dan mengadvokasi integrasi Indonesia. Selain itu, Fraksi Nasional tetap netral dalam pendiriannya. Tabel di bawah ini menampilkan arus dan gagasan yang dianut oleh berbagai partai politik di wilayah NIT:

Tabel 2. Partai Politik dan Alirannya di Wilayah NIT

Karesidenan	No	Nama Partai	Pimpinan	Aliran
Manado	1	Barisan Nasional Indonesia (BIN) PSSI Sulawesi Utara	G.E. Dauhan	Republikan
	2	KRIS	Y. Intan	Republikan
	3	Communisten	Permata	Republikan
	4	GIM (Gerakan Indonesia	C.L. Ponto	Republikan
	5	Merdeka) GAPERBOM (Gabungan	J. Dengah	Republikan
	6	Perjuangan Rakyat Bolmong)	B.H. Woworuntu	
	7	GERKINDO (Gerakan		Republikan
	8	Kebangsaan Indonesia	A.C. Manoppo	
	9	Partai Demokrat	A.Uno	Republikan
	10	Singa Minahasa	G.M. Bokings	Federalis
Maluku	1	PI (Persatuan Indonesia)	A. Mononutu	Republikan
	2	Gerakan Indonesia Merdeka PASMO (Partai Sejarah Maluku	Dano Umar Saifuddin Pupella	Republikan
	3	Utara) PIM (Partai Indonesia Merdeka)		Federalis
	4	Sembilan Serangkai	Litaay	Republikan Federalis
Timor	1	Lima Serangkai		Federalis

Sumber: Dikelola dari berbagai sumber (Soeloeh Rakyat, Negara Baroe dan Indonesia Timoer.

Pada tanggal 20 Desember 1947, organisasi-organisasi pergerakan mengadakan kongres di Makasar sebagai bagian dari proses pembangunannya. Kongres memutuskan untuk membentuk Partai Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI). Arnold Mononutu ditunjuk sebagai ketua, J.E. Taengkeng sebagai wakil ketua, dan Henk Rondonuwu sebagai sekretaris. GAPKI merupakan aliansi organisasi-organisasi pro-republik, antara lain Barisan Nasional Indonesia (Manado), Gerakan Indonesia Merdeka (Ternate), Persatuan Indonesia (Ternate), Partai Indonesia Merdeka (Ambon), Gerakan Nasional Indonesia (Gorontalo), Badan Penyelenggara Pemungutan Suara (Badan Penyelenggara Pemungutan Suara) (

Gorontalo), Partai Kedaulatan (Makasar), Partai Kebangsaan (Makasar), Partai Buruh Indonesia (Makasar), Partai Warga Negara Indonesia (Makasar), PSSI (Indonesia Timur), dan Pelayanan Rakyat Indonesia Maluku (Makassar). Tujuan dari partai ini awalnya adalah mendirikan negara federal bekerjasama dengan Belanda, yang dituangkan dalam perjanjian Linggajati. Namun tujuannya saat ini adalah mewujudkan negara Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Aliansi politik terbesar dan terkuat di Indonesia Timur adalah GAPKI yang dipimpin oleh Arnold Mononutu. GAPKI, sebagai kekuatan oposisi, mendapat respek yang sangat besar dan patut dipertimbangkan oleh pemerintah NIT. Arnold Mononutu dan

rekan-rekannya mendirikan partai tersebut setelah terpilih sebagai ketua GAPKI, dengan tujuan untuk memperkuat upaya pro-Republik baik di dalam parlemen maupun di luar parlemen. Pedoman perjuangan GAPKI adalah sebagai berikut :

1. Soekarno-Hatta mewakili perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan kekuatan kolektifnya.
2. Yogyakarta mewakili perjuangan kemerdekaan Indonesia.
3. Begitu sampai di Yogya, tetaplh di Yogya.

PI menyelenggarakan kongresnya yang kedua di Ternate pada tanggal 9 Januari 1948 dengan tujuan memilih pimpinan baru. Chasan Boesorie terpilih sebagai ketua umum baru dalam kongres tersebut, menggantikan Arnold Mononutu yang ditugaskan sebagai anggota senat NIT untuk Maluku Utara. PI, organisasi pro-Republik, terang-terangan mendukung dan beraliansi dengan Partai GAPKI pimpinan Arnold Mononutu di bawah arahan Chasan Boesorie. Arnold Mononutu memiliki posisi penting di parlemen NIT. Selain menjadi Ketua GAPKI, ia juga pernah terpilih menjadi Ketua Fraksi Progresif. Pada masa pembentukannya, parlemen NIT di bawah arahan Fraksi Progresif berperan penting dalam membina hubungan dengan tokoh-tokoh nasionalis.

Hal ini dapat dilihat ketika Belanda melakukan agresi militer I di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1947. Para anggota parlemen yang tergabung dalam Fraksi Progresif menyepakati mengirim misi muhibah ke Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta. Misi Muhibah ini bertujuan mempererat hubungan hubungan NIT dan RI. Gagasan tersebut disetujui perdana Menteri NIT Anak Agung Gde Agung, dan ketua Parlemen NIT Tajuddin Noor, keduanya pro-Republik. Pada tanggal 18 Pebruari 1948, berangkatlah misi

muhibah ke Yogyakarta, yang diketuai oleh Arnold Mononutu.

Rombongan yang berangkat menuju Yogyakarta mendarat di lapangan Udara Maguwo Yogyakarta diterima oleh wakil Republik yang terdiri dari ketua KNIP, Mr. Assat dan wakil Pemerintah Hamengku Buwono IX, rombongan langsung menuju istana kepresidenan di mana Bung Karno dan Bung Hatta serta seluruh anggota Kabinet dan anggota KNIP menerima rombongan dalam sambutan yang sangat meriah. Dalam pertemuan tersebut, Arnold Mononutu yang dipercayakan sebagai juru bicara dari NIT menyampaikan bahwa “meskipun rombongan datang ke daerah Republik mewakili Negara Indonesia Timur dan mewakili suatu pemerintahan ciptaan van Mook, namun hendaknya disadari bahwa NIT sudah dikuasai oleh kelompok nasionalis pro-republik. Jadi hendaknya tidak diragukan lagi dukungan penuh dari Negara Indonesia Timur untuk perjuangan menegakkan Negara Proklamasi 17 Agustus”. Dalam perpisahan antara pemerintah Republik dengan rombongan dari NIT, Bung Karno dan Hatta mengatakan kepada Arnold Mononutu “kami mempercayakan perjuangan kita di Negara Indonesia Timur kepada kalian”. Arnold Mononutu menjawab saya dan teman-teman dari bagian Timur Indonesia selama in tidak pernah tinggalkan RI dalam perjuangan meskipun jalannya berbeda.

Seusai melaksanakan tugas sebagai misi muhibah NIT ke Yogyakarta. Pada tanggal 19 Maret 1948 Arnold Mononutu kembali ke Ternate disertai Rosihan Anwar wartawan, sekaligus pemimpin redaksi ‘siasat’. Arnold Mononutu didampingi Rosihan Anwar melakukan pertemuan dengan Sultan Tidore Zainal Abidin serta pimpimpinan PI Tidore. Dalam pertemuan tersebut Sultan Tidore meminta kepada Arnold Mononutu agar memperjuangkan Papua ke dalam NIT. Arnold Mononutu

menjawab bahwa masalah Papua harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia dan bagi NIT merupakan harga mati. Masalah Papua harus menjadi agenda utama dalam program kerja-kerja partai di parlemen NIT dan juga pemerintah NIT sendiri sehingga setahun dalam kepemimpinannya dapat diwujudkan.

Sementara itu, di Ternate, iklim politik semakin memanas. Pada tanggal 23 Maret 1948, Anak Agung Gde Agung, Perdana Menteri NIT, berkunjung ke Ternate. Warga Maluku Utara Iskandar Djabir Syah mengadakan makan malam di istana Kesultanan Ternate. Pengurus PI di bawah pimpinan Abjan Soeleman melancarkan protes terhadap kedatangan Anak Agung Gde Agung karena dianggap berhubungan dengan pemerintah kolonial Belanda. Dengan membawa spanduk bertuliskan "pulanglah duch man", rombongan itu maju menuju istana. Namun sesampainya di Benteng Organje, mereka menemui penghalang yang dibentuk oleh tentara KNIL. Dalam kejadian ini, terjadi pertengkaran besar-besaran yang mengakibatkan beberapa oknum pendukung PI mengalami luka-luka. Anak Agung Gde Agung mewakili pemerintah NIT menyampaikan permintaan maaf kepada PI dan warga Ternate atas hal tersebut. Akhirnya sejumlah personel KNIL direlokasi ke Makasar. Iskandar Djabir Syah melaporkan kepada Anak Agung Gde Agung, Warga Malut, bahwa PI efektif meningkatkan kesadaran politik warga Malut.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer II terhadap Republik. Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia diduduki dan pimpinan Republik Soekarno dan Mohammad Hatta ditangkap. Hal tersebut membuat golongan federalis kehilangan kepercayaan terhadap Belanda dan janji-

janjinya. Mereka kini terang-terangan menyatakan simpati mereka pada RI. Sehari sesudah berita agresi Belanda, maka pada tanggal 20 Desember Parlemen NIT mengadakan sidang pleno. Parlemen NIT yang dikuasai oleh Fraksi Progresif menunjuk kembali Anak Agung Gde Agung sebagai Perdana Menteri, menggantikan Warrou yang pro-Belanda dengan program yaitu; *pertama*, membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta dan kembalikan ke Yogyakarta. *Kedua*, dalam waktu sesingkat-singkatnya mengadakan konferensi Meja Bundar (KMB) untuk membentuk Negara RIS yang merdeka dan berdaulat. Akibat aksi Militer II tersebut, organisasi GAPKI pimpinan Arnold Mononutu mengutuk agresi Kolonial Belanda, dan menolak gagasan van Mook yang terus membentuk negara-negara boneka dalam rangka pembentukan negara serikat yang mencakup keseluruhan Indonesia. Menurutnya agresi Militer II, bertentangan dengan Perjanjian Linggarjati serta bertujuan memecah belah bangsa Indonesia dan melemahkan RI.

Dalam keadaan politik yang demikian, Anak Agung Gde Agung untuk kedua kalinya mengusulkan agar Parlemen NIT mengirimkan utusan-utusan resmi untuk meninjau keadaan di daerah RI dan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak RI. Dengan membawa pandangan yang demikian itu, Arnold Mononutu dan beberapa tokoh Fraksi Progresif mengunjungi Yogyakarta dan Jakarta sebagai misi parlementer dari NIT. Dalam hal ini terdapat kesepakatan Parlemen NIT dengan RI dalam menghadapi Belanda. Pada pada 1949, Arnold Mononutu terpilih sebagai delegasi NIT Kemudian mereka ikut dalam perundingan-perundingan RI dan BFO (*Bijeenkomst voor Federal Orvelg*) di Yogyakarta dan Jakarta.

Dalam perkembangannya, kabinet Anak Agung Gde Agung mengalami

pergantian, dengan J.E. Tatengkeng mengambil alih posisi Perdana Menteri. Iskandar Djabir Syah, Sultan Ternate dan Residen Maluku Utara, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sejak 27 Desember 1949 hingga 14 April 1950 di kementerian ini. Namun demikian, masa jabatan kabinet ini tidak lama karena pada tanggal 20 April, Pupella, seorang anggota terkemuka Pemuda Indonesia Maluku (PIM), mengajukan resolusi tidak percaya kepada parlemen NIT. Akibatnya, Perdana Menteri NIT J.E. Tatengkeng mengundurkan diri dari jabatannya dan pemerintahan dibubarkan.

Pada masa kepemimpinan Poetoehena (10 Mei-16 Agustus 1950), terjadi beberapa pemberontakan, salah satunya adalah pemberontakan Andi Aziz di Makasar pada awal April 1950. Pemberontakan ini berujung pada krisis pada kementerian NIT. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada awal bulan Maret, menurut surat kabar Soeloeh Rakyat, terjadi peningkatan ketidakstabilan dan konfrontasi yang signifikan antara partai-partai federalis dan unitaris di Sulawesi Selatan, khususnya di Makasar, yang mengakibatkan skenario yang sangat kritis. Kelompok unitaris yang dipimpin oleh anggota parlemen dari Fraksi Persatuan Nasional Indonesia ini menyerukan agar pemerintahan Negara Indonesia Timur segera dibubarkan dan dimasukkan ke dalam batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam usaha menghadapi permasalahan tersebut, kabinet Poetoehena tidak banyak berbuat banyak. Alat kekuasaan Negara seperti polisi Negara di Sulawesi Selatan tidak berdaya untuk mengatasi segala kekacauan yang timbul, bahkan sudah tidak teratur lagi dan sudah kehilangan semangat sama sekali. Demikian juga pemerintahan daerah yang tidak berfungsi lagi. Selain itu para pemuda

pejuang RI juga mengorganisasikan diri dan bergiat untuk mendorong daerah-daerah lain dalam wilayah NIT untuk melucuti senjata APRIS dan mengambilalih tugas pengawasan pemerintahan.

Dalam perkembangannya pada tanggal 16 Agustus 1950 Perdana Menteri Poetoehena dan seluruh kabinetnya melatakan jabatan. Pada hari yang sama Badan Perwakilan Rakyat Negara Indonesia Timur sudah dianggap bubar dan demikian juga Negara Indonesia Timur yang mulai saat itu terpecah menjadi tiga propinsi, yaitu:

1. Propinsi Sunda Kecil, di bawah pimpinan Residen I Goesti Bagoes Oke.
2. Propinsi Sulawesi di bawah pimpinan Residen B.W. Lopian.
3. Propinsi Maluku, di bawah pimpinan Administrator P.T. Mantouw.

Oleh karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang kelima, Presiden Soekarno secara resmi mendeklarasikan pembubaran RIS. Demikianlah penutup sejarah Negara Indonesia Timur. Partai Republik pada akhirnya muncul sebagai pemenang. Setelah menghadapi hambatan selama empat tahun dari penguasa kolonial Belanda dan para pendukungnya di Indonesia, prinsip-prinsip Proklamasi 17 Agustus 1945 akhirnya dapat tercapai. Menyusul peralihan kekuasaan dari Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) ke Negara Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1950. Bersamaan dengan itu, Komisi Tiga Negara (KTN) secara resmi menyetujui masuknya Maluku Utara ke dalam Republik Indonesia. Arnold Mononutu dan Chasan Boesorie mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Ternate atas kontribusi dan dedikasinya, sehingga sebuah jalan dan rumah sakit diberi nama sesuai nama mereka.

B. Penolakan Sultan Ternate Atas Terbentuknya Republik Maluku Selatan (RMS)

Awal dari persoalan Republik Maluku Selatan (RMS), adalah ide beberapa politisi Ambon yang berkuasa pada masa NIT (1946-1950). Para politisi ini sebagian besarnya tergabung ke dalam organisasi Gabungan Sembilan Serangkai yang dipimpin oleh Dolf Metekohy, sejak awal mendukung konsep negara federal yang digagas oleh van Mook. Selain itu terdapat pula orang-orang yang tergabung dalam Partai Timur Besar yang orientasi politiknya pro-Belanda. Dalam perkembangannya tokoh-tokoh seperti; J. Manusama (Direktur *Ambonsche Burgerschool*), dan Ch. Soumokil (mantan Menteri Kehakiman NIT), tersingkir ketika pemerintahan NIT dikuasai oleh kelompok pro-Republik (Kabinet D.P. Diapari dan Poetoeheha) pada 14 Maret-16 Agustus 1950. Akhirnya tokoh-tokoh tersebut ingin memisahkan diri dari NIT.

Sejalan dengan itu, menurut R.Z. Leirissa, pemberontakan RMS sebenarnya merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan nasionalis (republikan) dengan golongan federalis yang telah berkembang sejak tahun 1946 dalam konperensi Denpasar. Aktor atau tokoh utama gagasan separatis RMS di prakarsai oleh Manusama yang pada waktu menjabat sebagai direktur *Ambonsche Burgerschool* dan Ch.R.S. Soumokil. Tokoh-tokoh tersebut tidak dikenal dalam masa pergerakan nasional bahkan tidak mau mengambil bagian dalam pergerakan rakyat yang dipimpin oleh Sarekat Ambon atau Partai Indonesia Merdeka.

Secara sosiologis tokoh-tokoh itu lahir dan dibesarkan dilingkungan masyarakat Belanda totok. Tempat kediaman mereka terpisah dan terletak di tempat-tempat kediaman elite yang disediakan untuk

orang-orang Belanda totok yang menjadi pejabat-pejabat tinggi dalam pemerintahan kolonial. Kedudukan mereka secara hukum dengan status *gelijkgesteld* (kewarganegaraan Belanda) diperlakukan sama seperti orang Belanda. Dengan demikian secara sosiologis dan politik bukan saja terpisah dari orang-orang Ambon, tetapi juga terpisah dari arus pergerakan nasional. Mereka inilah yang memaksa rakyat Maluku di pertengahan tahun 1950 mendeklarasikan berdirinya RMS.

Menjelang Proklamasi RMS, para tokoh RMS memobilisasi semua pasukan KNIL, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, untuk memanggul senjata mempertahankan RMS. Soumokil berhasil menghimpun kekuatan yang ada dilingkungan masyarakat Maluku Selatan, terutama anggota KNIL, dan kalangan pensiunan pegawai Belanda. Pada permulaan bulan April 1950 terjadi pemberontakan Andi Aziz menyebabkan kesatuan-kesatuan KNIL dari suku Ambon dipindahkan dari Makasar ke Ambon, terutama dari kesatuan-kesatuan “Baret Merah” dan “Baret Hijau” yang merupakan kesatuan-kesatuan komando yang berkemampuan tempur tinggi. Mereka ini merupakan kesatuan KNIL yang paling banyak mengalami indoktrinasi sebagai pengawal kolonialisme Belanda yang paling gigih. Moment tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Soumokil menjadikan mereka sebagai kesatuan Polisi Negara.

Seperti halnya dengan Soumokil, hal yang sama juga di lakukan oleh Manusama menggalang dukungan dari Rajapati (penguasa desa). Pada tanggal 4 April J. Manusama mengundang rapat para Rajapati (penguasa desa) dari Pulau Ambon bertempat dikantornya. Dihadapan para Rajapati ia melemparkan issue-issue terhadap TNI, antara lain bahwa TNI akan memusnahkan suku Ambon dan

mengislamkan orang-orang Kristen, dan pengabungan wilayah Maluku Selatan pada Negara Indonesia mengandung bahaya. Propaganda ini ternyata berhasil, mengingat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang keadaan sebenarnya.

Upaya tokoh-tokoh RMS untuk menggalang dukungan bukan hanya dilakukan di daerah Maluku Selatan. Hal yang sama juga dilakukan di daerah Maluku Utara. Untuk menyakinkan masyarakat Maluku Utara, issue yang sengaja dibangun para tokoh RMS adalah mendirikan “Republik Maluku Raya”. Dalam memperkuat perjuangan politiknya pada tanggal 4 Maret 1950 membentuk “Persatuan Maluku”, dibawah pimpinan J. Rieupassa dan mengirimkan 1 Peleton Baret Merah ke Ternate sebagai penjaga keamanan. Akan tetapi keberadaannya di Ternate tidak mendapat simpati dari masyarakat. Beberapa kekerasan yang dilakukan seperti; membakar bendera merah-putih, menangkap pemuda yang pro-Republik. Bahkan menyebut tokoh-tokoh pro-Republik seperti; Chasan Bosoroe, Arnold Mononutu, dan Ali Kamah dengan panggilan “Anjing Soekarno”. Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan terjadinya insiden dengan pemuda Republikan, sehingga mereka di tarik kembali ke Ambon.

Pada tanggal 12 April 1950, tokoh-tokoh RMS yang dimotori Soumokil menggunakan pesawat Catalina (semacam amfibi) mengunjungi Ternate. Mereka mengajak Sultan Iskandar Djabir Syah, sekaligus Residen Maluku Utara untuk bergabung mendirikan Negara Republik Maluku (RMS), yang terpisah dari Negara Indonesia Serikat (RIS). Walaupun Sultan Iskandar Djabir Syah adalah seorang yang pro-federal, namun ia menolak, selain alasan ideologi RMS bertentangan dengan konsep yang dianut dalam falsafah Kesultanan Ternate. Dari segi geografis wilayah Maluku Selatan merupakan daerah yang miskin

dalam sumber daya alam. Disamping itu Sultan Iskandar Djabir Syah mengatakan ia lebih menyukai satuan federal lebih luas yang mencakup seluruh Indonesia Timur, dimana orang Ambon tidak bisa mendominasi dan harus berada di bawah Negara Indonesia Timur (NIT). Dengan demikian RMS tidak mendapat dukungan dari Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah, dan seluruh masyarakat Maluku Utara.

Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). RMS yang dipimpin Christian Robert Steven Soumokil merupakan sebuah gerakan separatisme yang bertujuan bukan hanya ingin memisahkan diri dari NIT melainkan untuk membentuk Negara sendiri terpisah dari RIS. Proklamasi RMS merupakan peristiwa yang mengagetkan banyak kalangan, baik jajaran pimpinan RIS maupun NIT.

Proklamasi RMS dibenarkan oleh kenyataan bahwa NIT gagal mempertahankan statusnya sebagai negara sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil pada Konferensi Denpasar, yang sah dan tetap berlaku. Lebih jauh lagi, RIS telah bertindak bertentangan langsung dengan RTC dan konstitusinya sendiri. Proklamasi RMS dianggap asli karena selaras dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD, Raad Ambon) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret 1947. Isi deklarasi RMS adalah sebagai berikut:

Proklamasi Kemerdekaan Republik Maluku Selatan

“Memenuhi kemauan jang sungguh, tuntutan dan desakan rakjat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamir **KEMERDEKAAN REPUBLIK MALUKU SELATAN**, defakto de jure, jang berbentuk

Republik, lepas dari pada segala perhubungan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur dan R.I.S., beralasan N.I.T. sudah tidak sanggup mempertahankan kedudukannya sebagai Negara Bahagian selaras dengan peraturan² Mutamar Denpasar yang masih sah berlaku, juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tertanggal 11 Maret 1947, sedang R.I.S. sudah bertindak bertentangan dengan keputusan² K.M.B. dan Undang² Dasarnya sendiri”.

Selain alasan diatas, hal lain yang membuat mengapa mereka memproklamasikan RMS, bahwa di dalam konstitusi RIS pada pasal 2 secara jelas menyebutkan adanya negara-negara bagian dari RIS. Negara-negara tersebut sebelum bergabung ke dalam RIS, merupakan negara yang sah dan masing-masing mengurus rumah tangganya sendiri. Di dalam konstitusi RIS secara eksplisit memberikan kesempatan kepada rakyat negara-negara bagian untuk menyatakan pendapatnya untuk dapat melepaskan diri dari ikatan RIS. Di samping itu dalam lembaran Negara Hindia Belanda (*Indische Staatsblad*) No. 27 tahun 1946 yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan pada awal pembentukan NIT mengisaratkan daerah swapraja secara mandiri maupun beberapa swapraja dapat berkerja sama untuk mengadakan: (1). Dewan Pembuat Undang, dan (2). Dewan yang turut membuat undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menghendaki daerah otonom memiliki lembaga legislatif. Aspek inilah di jadikan alasan mengapa mereka memproklamirkan RMS.

Dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut secara damai, pemerintah Indonesia mengutus Leimena dan Sultan Ternate, Iskandar Syah, yang berasal dari Maluku.

Namun demikian, Soumokil dengan tegas menolak upaya damai ini dan secara aktif mencari bantuan, perhatian, dan pengakuan dari pihak eksternal, khususnya Belanda, Amerika Serikat, dan komisi PPB untuk Indonesia. Selain pemerintahan RIS, tokoh Ambon juga turut andil dalam upaya mencari solusi tersebut, dengan tujuan memitigasi hasutan massa dari pihak-pihak yang mendukung RMS. Akibat kebuntuan perundingan perdamaian, pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno-Hatta mengeluarkan ultimatum kepada seluruh oknum RMS yang telah mendeklarasikan berdirinya Republik Maluku Selatan, menuntut penyerahan diri kepada pemerintah Indonesia.

Pada Juli 1950 akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan RMS. Gerakan operasi militer ini dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Dalam waktu sekitar empat bulan yakni pada Juli-Nopember tahun itu juga operasi penumpasan RMS dipandang berhasil dan selesai. Sebahagiannya ditangkap dan dikirim ke Pulau Jawa, sementara sebahagian yang lain melarikan diri ke Negeri Belanda. Kepindahan para pimpinan RMS ini mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan jatuhnya Ambon maka perlawanan RMS dapat dipatahkan dan sisa-sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram.

Sejumlah pejabat RMS, antara lain Manuhutu (Presiden), Wairisal (Perdana Menteri), dan Caspersz (Menteri Dalam Negeri), melarikan diri ke Seram. Sedangkan Manuhutu berhasil melarikan diri ke Belanda dan meninggal dunia di sana. Penghasut intelektual RMS, Soumokil, yang juga melarikan diri ke Seram, akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Menyusul pemberantasan gerakan separatis RMS

secara tegas, Pemerintah RIS menunjuk Latuharhary sebagai Gubernur untuk menjalankan pemerintahan sipil di Maluku, termasuk juga Maluku Utara. Proklamasi RMS merupakan peristiwa negatif dalam sejarah Maluku. Beruntungnya, masyarakat Maluku Utara yang teguh berkomitmen sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, tidak terpengaruh atau terpengaruh dengan keyakinan yang disebarkan oleh RMS.

Setelah bubarnya negara Indonesia Serikat 17 Agustus 1945, Leimena sengaja menghembuskan isu bahwa Sultan Iskandar Djabir Syah selain sebagai tokoh federalis adalah pendukung RMS, dan membuat makar terhadap Republik Indonesia karena ideologi federalisme yang dianutnya. Akibatnya pada 21 Agustus 1950, pemerintah RI mengirimkan 50 anggota TNI dari Yogyakarta yang ditugaskan untuk menangkap Sultan Iskandar Djabir Syah. Pasukan di bawah pimpinan Letnan Koraag bertemu dengan Sultan Iskandar Djabir Syah di istana. Mereka lalu menginterogasinya tentang laporan keterkaitan dengan RMS dan kefanatikannya pada konsep federalisme yang ia perjuangkan dalam NIT. Sultan Iskandar Djabir Syah menjawab, bahwa “apakah dilarang kalau Indonesia adalah negara demokrasi, dengan ideologinya adalah federalis yang mendapat jamin dalam UUD 1945”. Tentang keterlibatannya dengan RMS, Sultan dengan tegas membantah, ia tidak ada kaitan sedikitpun dengan gerakan RMS tersebut. Ia memang pernah mendapat surat dan kunjungan dari tokoh RMS tapi ia menolak usulan tersebut. Setelah diperiksa selama 2 jam akhirnya sultan dijadikan tahanan rumah.

Meskipun tidak terbukti bahwa Sultan Iskandar Djabir Syah terlibat dengan gerakan RMS, namun ia tetap ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk menjelaskan keterlibatannya sebagai tokoh federalis. Selama di Jakarta Sultan Iskandar Djabir

Syah tinggal di rumah Gubernur Maluku Latuharhary. Presiden Soekarno kemudian memanggil Sultan Iskandar Djabir Syah ke istana negara dan menanyakan tentang ideologinya. Sultan menjawab bahwa Maluku adalah daerah 1.000 pulau dengan 2 juta lebih manusia dengan segala beragam budayanya, hanya efektif jika Indonesia menganut negara federal, apakah dilarang kalau Indonesia adalah negara demokrasi dengan ideologinya federal. Dengan alasan itulah kemudian Presiden Soekarno menjadikannya sebagai tahanan politik dengan mengangatnya sebagai pegawai tinggi pada Kementerian Dalam Negeri hingga wafat pada tahun 1976.

C. Pemilu 1955 di Ternate: Elite Kesultanan vs non Kesultanan

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, untuk pertama kalinya Negara Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955 dibawah Kabinet Boerhanoeddin Harahap (Masyumi). Sebagai negara demokrasi partai politik memegang peranan penting dalam memperjuangkan aspirasi politik. Dalam konteks itu, elite Kesultanan Ternate melihat partai politik sebagai instrumen politik untuk membangun kembali kekuasaan politiknya pasca pengasingan Sultan Iskandar Djabir Syah ke Jakarta.

Sebagaimana disinggung diatas, perbedaan persepsi mengenai bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, mendorong elite kesultanan mendukung partai yang memiliki ideologi yang sejalan dengan kepentingan politiknya. Dalam hal ini mereka memilih bergabung dengan Partai Indonesia Raya (PIR) pada bulan Mei 1950 yang berideologi Swapraja. Dalam konteks itu, elite kesultanan melihat PIR sebagai sebagai instrumen politik yang cukup penting. Lebih-lebih kekuasaan yang

mereka miliki dalam struktur kenegaraan sudah dihapuskan, sejalan dengan pembubaran dewan raja-raja (badan eksekutif), dan *Noord Molukken Raat* (badan legislatif).

Beberapa argumen mengapa elite kesultanan mendukung PIR, yakni; *pertama*, daerah swapraja, diakui, disahkan dan dijamin sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. *Kedua*, Swapraja, dijamin, diakui, disahkan oleh UUDS Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejak bergabung dengan PIR, elite kesultanan terlibat aktif dalam perorganisasian gerakan-gerakan pendukung swapraja. Seperti mengadakan unjung rasa besar-besaran di lapangan Salero saat pengasingan Sultan Iskandar Djabir Syah ke Jakarta pada 1951. Pilihan politik dengan tidak mendukung partai pemerintah (PNI), tentu tidak menguntungkan, karena mereka harus menghadapi, tidak hanya rival politik nasional tetapi juga lokal.

Pilihan untuk masuk keranah politik, bukan merupakan hal baru bagi elite Kesultanan Ternate. Pada awal kemerdekaan elite kesultanan sudah mendirikan partai politik lokal yang bercorak *rijksverband* yakni PASMO (Partai Sedjarah Maluku Utara). Melalui partai tersebut dapat mengantarkan Salim A. Fabanyo dan Sultan Iskandar Djabir Syah sebagai anggota senat mewakili Maluku Utara pada konpres Malino dan Denpasar 1946. Ketika bubarnya Negara Indonesia Serikat (RIS), maka kegiatan berpolitik, dialihkan dengan

mendukung PIR yang dipimpin Saban Amra, perdana menteri Kesultanan Ternate.

Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 1955 berlangsung dibawah sistem demokrasi liberal sesuai jiwa dan semangat pasal-pasal UUD Sementara. Di tingkat pusat, terdapat empat partai yang memperoleh jumlah kursi yang besar seperti PNI (57), Masyumi (57), NU (45) dan PKI (39). Khusus untuk daerah Maluku, Partai Masyumi memperoleh 117.440 suara. Parkindo berada pada posisi kedua dengan meraih 108.920 suara. Urutan ketiga PNI dengan meraih 36.602, sedangkan partai PIR mendapatkan 19.068 suara dan menduduki urutan keempat.

Kemenangan Masyumi tentu sangat mengejutkan karena pada saat itu Masyumi bukan partai yang tergolong besar di Propinsi Maluku yang mayoritasnya beragama Kristen. Kemenangan yang sama pun di peroleh Partai Masyumi untuk daerah pemilihan Maluku Utara (Ternate). Hasil perolehan suara di daerah pemilihan Ternate menghasilkan lima besar yakni; Masyumi dengan meraih 51.410 suara dan memperoleh 5 kursi. Parkindo meraih 25.594 suara dan memperoleh 3 kursi. PIR meraih 17.080 suara mendapat 3 kursi baik di DPRD Maluku maupun di Konstituante. PNI meraih 14.977 suara dan memperoleh 2 kursi, dan PSII 2.729 suara dan memperoleh 2 kursi. Hasil keseluruhan perolehan suara partai-partai dalam Pemilihan Umum tahun 1955 di Maluku dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 di Maluku

NO	PARTAI PESERTA	UNTUK DPR	UNTUK KONSTITUANTE
1	MASYUMI	117.440	102.615
2	PNI	30.218	36.602
3	NU	-	-
4	PKI	3.792	4.936
5	PSII	11.310	8.762

6	PARKINDO	108.920	109.262
7	P. KHATOLIK	18.710	18.906
8	PSI	1.358	1.814
9	PERTI	-	-
10	IPKI	2.733	2.649
11	GP.PANCASILA	345	390
12	PRN	287	1.115
13	PPPRI	2.900	2.042
14	P.MURBA	1.553	-
15	PARTAI BURUH	3.073	1.491
16	PII	-	-
17	PERSATUAN DAYAK	-	-
18	P. WANITA RAKYAT	1.353	471
19	APTI	-	-
20	P. RAKYAT DESA	-	-
21	R.YUJONO	-	-
22	PIR	19.068	18.204
23	PERBAI	8.470	-2.210
24	BAPERKI	-	-
25	GERINDO	-	-
26	PPDMT	147	137
27	NUSA INA	651	1.381
	JUMLAH	332.128	312.987

Sumber : Direktorat Sosial Politik Kantor Gubernur KDH Tingkat I Maluku 1955

Kemenangan Masyumi di Kota Ternate, tentu saja menyulitkan posisi elite kesultanan, karena bagaimanapun Masyumi adalah kekuatan politik utama yang menggerakkan anti pemerintahan *swapraja* yang dimotori tokoh-tokoh Persatuan

Indonesia (PI). Walaupun PIR mendapat dukungan dari Kesultanan Ternate, namun Masyumi mendapatkan suara mayoritas dengan mengungguli partai-partai lainnya di Maluku Utara termasuk PNI. Lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Pemilihan Umum di Ternate 1955

No	Nama Partai	Tahun 1955
1	PERTI	-
2	PSII	2.729
3	NU	-
4	MASYUMI	51.410
5	PARTAI BURUH	210
6	KHATOLIK	460
7	PARKINDO	25.594
8	MURBA	521

11	PNI	14.977
12	IPKI	730
13	PPPRI	450
14	PIR	17.080
15	PKI	1.571

Sumber: Direktorat Sosial Politik Kantor Gubernur KDH Tingkat I Maluku 1955

Kemenangan Masyumi pada pemilu 1955 di daerah pemilihan Ternate disebabkan persoalan ideologi. Bagi kelompok non-kesultanan khususnya etnis Tidore, Makian dan Bacan yang fanatik Islam mendukung Masyumi dengan pertimbangan bahwa Partai ini sedang berada pada posisi kekuasaan dan berpotensi menjadi partai besar. Kegiatan kampanye Pemilu sangat diwarnai isu-isu keagamaan. Dimana Agama dijadikan sebagai alat untuk menciptakan simbol partai, membangun basis massa, mengemas isu, sekaligus target perjuangan partai. Di berbagai surat kabar tokoh-tokoh Masyumi seperti Abjan Soelemen, Arsyad Hanafi dan Abdul Halil menyerang dan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Sultan Iskandar Djabir Syah sebagai tokoh pro-Belanda, sehingga kenyataannya diasingkan oleh Soekarno ke Jakarta.

Sementara kekalahan partai Kesultanan Ternate (PIR), selain disebabkan faktor non teknis seperti; banyak masyarakat yang buta huruf sehingga tidak mampu membedakan partai yang dipilih, adalah faktor ketidakmampuan para elite untuk menggalang massa tradisionalnya. Dengan demikian kekalahan PIR dalam Pemilu 1955 memperlihatkan betapa lemahnya kedudukan politik elite kesultanan tanpa dukungan politik Sultan Ternate Iskandar Djabir Syah. Namun demikian, Pemilu 1955 termasuk peristiwa unik dalam sejarah Indonesia, karena sebagai sebuah negara baru telah mampu dan sukses menyelenggarakan pemilu nasional yang paling demokratis. Menurut Ruth McVey Pemilu 1955 tersebut telah menghasilkan satu-satunya pemilihan umum yang betul-betul bebas, jujur dan adil yang pernah dialami dan disaksikan di negara ini.

Tabel 5. Nama-nama Partai Politik, Pengurus dan Jumlah Kursi di DPRD Maluku Utara 1955

No	Nama Partai	Nama Ketua Partai	Perwakilan di DPRD TKT II
1	Masyumi	-	5 kursi
1	PNI	N. Iskandar Alam	2 kursi
2	PIR	Hadji Saban Amra	3 kursi
3	PARKINDO	Joh Tak.	3 kursi
4	PSII	Darwis Pryono	2 kursi
5	PKI	Hadji N.B. Madjid	1 kursi
6	PARTINDO	Ismail Madjid	-
7	KATOLIK	Padachan. Padachan	-

Sumber: Naskah Pengusulan Tingkat I Provinsi Maluku Utara, 1964.

Satu hal yang sangat menarik pada pemilu 1955 di Ternate adalah kehadiran Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI menduduki peringkat ke 6 dari 15 partai peserta Pemilu, bahkan suaranya signifikan dengan memperoleh 1.571 suara sehingga dapat mengemparkan masyarakat Ternate yang dikenal agamais. Keberadaan PKI di Pulau Ternate merupakan pelarian tokoh-tokoh PKI berasal Digul Papua dan Pulau Banda. Di motori oleh M.A kamaruddin dan Bohang, mereka kemudian memperluas pengaruhnya di Pulau Ternate PKI. Ketika meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI 1965, selain kedua tokoh tersebut, para simpatisan PKI dan masyarakat yang diduga terlibat dalam Peristiwa G.30.S/PKI di tangap di bawa ke Pulau Buru dengan kapal laut.

Dalam upaya menumpas komunisme khususnya di bidang ideologis. Di Pulau Ternate di beberapa tokoh buku di larang mengedarkan buku-buku karangan Pramoedya Ananta Toer, Joebaar Ajoeb, Rivai Apin, dan menyita serta membekukan buku-buku yang dikarangnya, karena dianggap mengandung ajaran komunis, sehingga buku-buku tersebut dilarang beredar di masyarakat. Penyitaan dan pembekuan buku-buku tersebut didasarkan pada intruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1381/1965.

KESIMPULAN

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai dimulainya kemunduran feodalisme dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia (RI), yang memberikan tantangan besar terhadap perekonomian dan politik. dominasi elite Kesultanan Ternate. Fungsi tradisional dan status elit yang mereka nikmati secara turun-temurun dipertanyakan

karena munculnya ideologi negara kesatuan yang mengedepankan pengabdian kepada negara sebagai prioritas utama.

Eksisnya elite Kesultanan Ternate sejak pasca kemerdekaan hingga sekarang. Menunjukkan Kesultanan Ternate memiliki peran politik yang signifikan dalam setiap periodisasi sejarah politik lokal di Indonesia. Khususnya pada masa pemerintahan Sukarno dan Soeharto, Kesultanan Ternate secara konsisten menghadapi tantangan dan memperjuangkan eksistensinya. Mereka mempunyai kemampuan untuk mempertahankan posisi politiknya sebagai tumpuan pedoman di tengah eksistensi komunal. Elit Kesultanan Ternate menunjukkan ketahanan yang luar biasa, tidak hanya dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, namun juga dengan menduduki posisi berpengaruh dan memainkan peran penting dalam membentuk arah dan lintasan perubahan tersebut.

Hal itu dapat dilihat sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sultan Ternate ke 46 Iskandar Jabir Syah (1929-1975), mengambil sikap politik yang berbeda dengan sebagian besar kaum nasionalis Indonesia, yaitu menerima gagasan negara federal yang digagas oleh Herbertus J. van Mook. Ia mengikuti konperensi Malino dan Denpasar pada 1946, sebagai anggota senat mewakili Maluku Utara dalam rangka pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT).

Pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 24 Desember 1946 mendapat dukungan baik dari para pendukung federalisme. Iskandar Jabir Sjah meyakini berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT) akan membawa bangsa sejahtera. Hal ini karena NIT dapat menjamin keadilan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya karena fokusnya yang lebih sempit. Selain itu, hal ini dapat memberikan sarana bagi raja-raja di Indonesia Timur untuk mempertahankan

kekuasaannya. Sebagai pendukung federalisme, saya aktif mengadvokasi pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) sejak konferensi Malino hingga Denpasar. Pada tahun 1949, Iskandar Jabir Sjah ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri NIT di kabinet J.E. Tatengkeng bertugas mulai 27 Desember 1947 hingga 14 Maret 1950.

Menyusul bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintahan Presiden Sukarno mengutus Sultan Ternate, Iskandar Djabir Syah, ke Jakarta sebagai tahanan politik karena tuduhannya keterlibatan dalam kegiatan federalis. Selama berada di Jakarta, beliau menjabat sebagai staf di Departemen Dalam Negeri pada tahun 1951 hingga 1967.

Daftar Pustaka

- Lapian, A.B. (1980), dalam pengantar *Memorie van Overgave J.H. Tobias (1857)- Memorie van Overgave C. Bosscher Residen Ternate (1859)*, Jakarta: ANRI.
- Hasan, A.A. (2000). *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Hasan, A.H. dan Abdulrahman, Y. (1995). *Hubungan Kerajaan Ternate dan Tidore dalam Sejarah Maluku Kie Raha*. Ternate: Universitas Khairun, 1995.
- Anas Dinsie, A. & Rinto Taib. (2010). *Ternate Sejarah, Kebudayaan & Pembangunan Pedamaian Maluku Utara*. Ternate: LeKRa-MKR.
- Adnan Amal. (2007). *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950*. Jakarta: Gora Pustaka Indonesia.
- AA GN Ari Dwipayana. (2004). *Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*. Yogyakarta, IRE Press.
- A.C. van Der Leeden. (1980). “Gale Maya, Phology of a Tone Lenguange of the Raja Ampat Islands” daam Masinambaw E.K.M. (Ed.) *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk. Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi*, Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Audrey, Kahin. (2005). *Dari Pemberontakan Ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Audrey, Kahin. (1990). *Pergolakan Daerah Pada awal Kemerdekaan*. Jakarta: Grafiti.
- Andrian, Vickers. (2009). *Peradaban Pesisir Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*. Bali: Udayana University Press.
- Bambang, Purwanto. (2006). *Gagalnya Historiografis Indonesia Sentris*. Yogyakarta: Ombak.
- Battomore, T.B.. (2006). *Elit dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institut.
- B. Soelarto. (1982). *Sekitar Tradisi Ternate*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan RI.
- C.L. Voorhoeve. (1980). “The Non-Austronesia Languages in the Nort Moluccas” dalam Masinambaw EKM. (ed), *Halmahera dan Raja Ampat Sebagai Kesatuan Majemuk Suatu Studi Terhadap Suatu Daerah Transisi*. Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- Chasan, Bousoiri. *Sekulimit Derita Satu Edisi Kehidupan Seorang Dokter*, Jakarta: tanpa Tahun.

- Clifford, Geertz. (1981). *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Darsiti, Soeratman. (2002). *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Djoko, Soekiman. (2000). *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat di Jawa (Abad XVIII –Medio Abad XX)*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Dheni, Tjan. (2005). “Aristokrasi di era Modern Studi Tentang Pergulatan Elite Lokal dan Masyarakat Tidore Terhadap Kemunculan Kembali Sultan Tidore di Akhir Abad XX”. *Tesis*, UGM, 2005.
- George, Mc Turnan Kahin. (1980). *Nasionalisme and Revolusi Indonesia*, ter. Ismail Muhammad dan Zakaren Abdul Rashid. Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Gerry, van Klinken. (2007). *Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV.
- Houben, V.J.H. (1994). *Keraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870*. Leiden: KITLV Press.
- Hanna, Willard A. & Des Alwi. (1996). *Ternate dan Tidore Masa Lalu Penuh Gejolak*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Heather, Sutherland. (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jusuf, Abdulrahman. (2002). *Kesultanan Ternate; Dalam Jou Ngon Ka Dada Madopo Fangare Ngon Ka Alam Madiki*. Manado: Media Pustaka.
- Kuntowijoyo. (1990). *Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa Dimasa Orde Baru*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.
- Leonard, Y. Andaya. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.